

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pemikiran

Setelah melalui berbagai perjuangan yang berat dalam mengusir penjajahan dari Indonesia, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia berhasil memproklamkan kemerdekaannya. Soekarno dan Hatta mewakili seluruh bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaan Indonesia. Namun, perjuangan dalam mencapai kemerdekaan yang utuh tidak berhenti sampai di situ saja. Bangsa Belanda kembali memasuki wilayah Indonesia dengan membonceng pasukan Sekutu (Tosirin, 2018). Belanda meminta kepada Sekutu untuk mengizinkan NICA bergabung dengan pasukan AFNEI (Rizal, 2021). Bangsa Indonesia masih harus menghadapi pihak Belanda karena Belanda enggan untuk mengakui kedaulatan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Bangsa Indonesia kembali berjuang untuk mencapai kemerdekaan yang utuh. Berbagai bentuk perjuangan dilakukan oleh bangsa Indonesia, baik perjuangan secara fisik maupun perjuangan melalui jalur diplomasi (Budiman, 2017).

Diplomasi memiliki banyak pengertian, salah satunya adalah diplomasi dapat diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan untuk mengelola hubungan internasional melalui jalan perundingan. Dalam Encyclopaedia Britannica disebutkan bahwa terkadang dalam diplomasi, diselipkan sebuah ancaman dengan tujuan untuk menekan dan memaksa

pihak yang sedang berdiplomasi. Diplomasi juga dilakukan dengan tujuan agar politik pemerintahan sebuah negara dapat dipahami dan diterima oleh pemerintah lainnya. Salah satu kunci utama dari keberhasilan diplomasi adalah pengetahuan dan ketepatan dalam mempertimbangkan sesuatu. Metode dari diplomasi tidak hanya perundingan saja, perundingan hanyalah salah satu bentuk dari metode- metode diplomasi (Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005).

Metode diplomasi terdiri dari berbagai bentuk pertemuan. Bentuk-bentuk pertemuan tersebut antara lain perundingan, konvensi, dan konferensi. Masing-masing metode tersebut memiliki strategi, tata cara, dan norma masing-masing. Beberapa contoh metode diplomasi yang sering digunakan, antara lain *open diplomacy*, *secret diplomacy*, *conference diplomacy*, dan *humanitarian diplomacy*. *Open diplomacy* merupakan sebuah diplomasi yang perundingannya dilakukan secara terbuka dan hasil dari perundingan tersebut akan langsung diumumkan. Berbeda dengan *open diplomacy*, perundingan yang dilakukan dengan metode *secret diplomacy*, tempat dan hasil dari perundingan tersebut tidak akan diumumkan karena hal tersebut dirahasiakan. Sementara itu, *conference diplomacy* adalah diplomasi yang dilakukan sebagai bagian dari pengendalian hubungan antara pemerintah dan hubungan antara pemerintah dan organisasi-organisasi antara pemerintah, dan diplomasi tersebut dilakukan dalam sebuah konferensi internasional. *Humanitarian diplomacy* merupakan sebuah diplomasi yang dilakukan untuk menjalin kerja sama antarbangsa

dan dilakukan dengan cara memberikan bantuan kemanusiaan kepada bangsa lain yang sedang ditimpa musibah (Panitia Penulisan Sejarah Diplomasi Republik Indonesia, 2005).

Perjuangan melalui jalur diplomasi ditempuh dengan melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Perundingan dengan Belanda tidak hanya berlangsung sekali saja. Hal tersebut dikarenakan perundingan yang dilakukan tidak langsung menghasilkan sebuah keputusan yang dapat menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak Belanda dengan pihak Republik Indonesia. Perundingan-perundingan tersebut antara lain adalah perundingan Linggarjati, perundingan Renville, dan perundingan Roem- Royen. Sebelum Indonesia dan Belanda melakukan perundingan di Linggarjati, perjanjian Hoge Veluwe sudah diadakan terlebih dahulu (Roem, 1989). Namun, dari perundingan tersebut belum dapat ditemukan titik terang untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi antara pihak Indonesia dan Belanda. Oleh karena itu, diselenggarakanlah perundingan Linggarjati.

Perjuangan melalui jalur diplomasi tidak berhenti pada perundingan Linggarjati. Bangsa Indonesia kembali mengadakan perundingan dengan pihak Belanda di atas kapal milik Amerika Serikat. Perundingan ini dikenal dengan nama perundingan Renville. Namun, setelah ditandatanganinya perundingan tersebut, permasalahan Indonesia dengan Belanda tetap tidak menemukan titik terang. Pada Desember 1948, pihak Belanda dalam Perjanjian Renville menyatakan bahwa pihaknya tidak lagi dapat

melanjutkan perundingan tersebut karena Indonesia menolak konsepsi yang dibentuk oleh pihak Belanda (Tashadi et al., 1991). Bahkan, setelah diselenggarakannya perundingan Renville, pihak Belanda justru melakukan sebuah agresi militer ke-2 kepada Indonesia pada tanggal 19 Desember 1948. Sebelumnya, Belanda juga mengingkari perjanjian Linggarjati dengan melakukan Agresi Militer ke-1 pada tanggal 21 Juli 1947. Penyerangan dilakukan di wilayah Yogyakarta, yang menjadi sumber kekuatan rakyat Indonesia dan sekaligus menjadi Ibukota Republik Indonesia pada saat itu (Roem, 1972). Di samping itu, Belanda melakukan agresi militer di wilayah Republik Indonesia dengan tujuan untuk menguasai daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam (Nasrullah, 2016).

Pihak Belanda melakukan penyerangan pada tanggal 19 Desember 1948 dengan alasan bahwa Indonesia telah mengkhianati isi dari perjanjian yang telah disepakati. Namun, alasan tersebut bukanlah alasan yang sebenarnya. Di sisi lain, Indonesia juga merasa apa yang sudah dilakukan oleh Belanda telah melanggar isi dari perjanjian yang telah disepakati. Pihak Indonesia dan Belanda sama-sama merasa bahwa terdapat sebuah pengkhianatan dalam perjanjian yang mereka sepakati (Roem, 1989). Namun, penyerangan tersebut tetap tidak dibenarkan oleh banyak pihak. Penyerangan yang dilakukan oleh Belanda memunculkan

reaksi-reaksi dari pihak lain, di antaranya berasal dari pihak BFO, Asia, dan PBB (Syah, 2016). Dewan Keamanan PBB merupakan salah satu pihak yang mendesak Belanda untuk menghentikan serangan tersebut. Selain itu, Dewan Keamanan PBB juga memberikan perintah kepada Belanda dan Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi secara damai dan melalui jalur perundingan (Roem, 1977). Banyak pihak yang kecewa dengan keputusan Belanda kembali melakukan penyerangan terhadap wilayah Republik Indonesia. Dewan Keamanan PBB merasa tersinggung dengan tindakan yang dilakukan oleh pihak Belanda tersebut. Selain itu, Panitia Jasa-Jasa Baik merasa diperlakukan tidak pantas oleh Belanda. Negara-negara lain pun juga menyayangkan tindakan Belanda yang melanggar perjanjian gencatan senjata (Ricklefs, 2005).

Dewan Keamanan PBB turut mengambil sikap dalam penyelesaian masalah yang terjadi antara Indonesia dengan Belanda terkait pengakuan kedaulatan Indonesia. Dewan Keamanan PBB bersama beberapa negara lainnya, termasuk India menggelar sidang yang di dalamnya membahas sengketa antara Indonesia dengan Belanda (Insaniwati, 2002). Sidang tidak hanya dilakukan sekali, tetapi dilakukan beberapa kali dan menghasilkan beberapa resolusi. Resolusi-resolusi tersebut nantinya akan menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan Indonesia dalam merebut kembali kekuasaannya di wilayah Yogyakarta. Resolusi yang dihasilkan menjadi cikal bakal terbentuknya sebuah pernyataan yang memiliki nama resmi

Pernyataan Royen-Roem atau yang lebih dikenal dengan nama Perjanjian Roem Royen (Roem, 1977).

Perundingan yang ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 menghasilkan dua pernyataan dari pihak Indonesia dan pihak Belanda. Pihak Indonesia melalui Mohamad Roem secara garis besar menyatakan penghentian perang gerilya serta keikutsertaannya dalam Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Sedangkan dari pihak Belanda melalui Jan Herman van Royen secara garis besar menyatakan penghentian gerakan militer dan pengembalian Yogyakarta kepada Republik Indonesia (Hartiyah, 2017). Kesepakatan antara pihak Belanda dan Indonesia yang tertuang dalam Perundingan Roem-Royen tidak dapat dilepaskan dari campur tangan Mohamad Roem di dalamnya. Mohamad Roem merupakan salah satu tokoh yang berjasa untuk Indonesia. Berkat keahliannya dalam berdiplomasi, ia dapat mengantarkan Indonesia pada kemenangan. Dalam perundingan tersebut, Roem dipercaya menjadi ketua delegasi Indonesia. Bersama anggota delegasi Indonesia lainnya, Roem memperjuangkan kedaulatan negara Republik Indonesia, termasuk memperjuangkan pengembalian Yogyakarta sebagai Ibukota negara Republik Indonesia (Insaniwati, 2002).

Penulis menemukan penelitian-penelitian terdahulu seperti dalam penelitian yang dilakukan oleh Shintanin Navis (Skripsi, Universitas Jember 2014), Septi Daru Kurniawati (Skripsi, Universitas Sanata Dharma 2007), Lusiana (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah 2007), Agus Purwanto (Skripsi, UIN Sunan Kalijaga 2007), dan Yulfizar Rivai (Skripsi,

Universitas Indonesia 1989). Dalam penelitian-penelitian terdahulu tersebut, pembahasan mengenai peranan-peranan Roem memiliki cakupan yang lebih luas, tidak hanya pada perundingan Indonesia dengan Belanda, tetapi juga peran Roem di dunia politik dan pemerintahan. Selain itu, penulis juga menemukan penelitian terdahulu dengan judul “Perundingan Roem-Royen dalam Pemberitaan dan Opini Harian Waspada Medan 1949” yang ditulis oleh Abdul Rahman Hakim (Skripsi, Universitas Negeri Medan 2013). Penelitian tersebut berisi tentang analisa, opini, dan tujuan yang ingin disampaikan oleh Harian Waspada terhadap Perundingan Roem-Royen.

Pada penelitian ini, penulis akan lebih berfokus pada pembahasan mengenai latar belakang Roem yang membuatnya berhasil menjadi diplomat handal dalam memimpin delegasi Republik Indonesia di Perundingan Roem-Royen, perundingan yang dilakukan sebagai usaha untuk mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta dan bagaimana proses perundingan antara Indonesia dengan Belanda hingga terselenggara Perundingan Roem-Royen. Alasan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengembalikan ingatan mengenai sosok Mohamad Roem, seseorang yang memiliki jasa baik bagi negara ini. Selain itu, alasan lainnya adalah karena periode tersebut merupakan salah satu periode penting dalam sejarah Indonesia sehingga hal ini juga penting bagi pembelajaran sejarah, terutama pembelajaran Sejarah Indonesia periode 1945-1949 di mana perjuangan bangsa Indonesia tidak hanya sampai pada Proklamasi saja, setelahnya bangsa Indonesia masih harus berjuang untuk

mempertahankan kemerdekaan dan Perundingan Roem-Royen sebagai bentuk perjuangan melalui jalur diplomasi tidak kalah pentingnya jika dibandingkan dengan perjuangan melalui perlawanan fisik atau senjata. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Roem beserta anggota delegasi lainnya dalam menyusun strategi menghadapi pihak Belanda, akhirnya tercapai kesepakatan dalam Perundingan Roem-Royen yang berhasil mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu batasan temporal dan spasial. Batasan temporal dari penelitian ini adalah tahun 1949. Alasan pemilihan tahun 1949 sebagai batasan temporal dalam penelitian ini karena pada tahun tersebut terselenggara Perundingan Roem-Royen dan tepat pada tanggal 14 Mei 1949, Perundingan Roem-Royen ditandatangani oleh ketua delegasi dari pihak Belanda dan pihak Indonesia. Selain itu, saat itu juga terjadi peristiwa pengembalian Ibukota Republik Indonesia ke wilayah Yogyakarta setelah sebelumnya Belanda melakukan aksi Agresi Militer 2 di wilayah Yogyakarta.

Batasan spasial yang ditentukan dalam penelitian ini adalah wilayah Indonesia. Pemilihan wilayah Indonesia sebagai batasan spasial dalam penelitian ini karena Perundingan Roem-Royen merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh pemerintah Republik Indonesia dalam pengembalian wilayah Yogyakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan dasar pemikiran tersebut, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang Mohamad Roem sehingga berhasil memimpin delegasi RI dalam Perundingan Roem-Royen?
2. Bagaimana proses perundingan antara Indonesia dengan Belanda hingga terselenggara Perundingan Roem-Royen?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang Mohamad Roem selaku ketua delegasi RI dalam Perundingan Roem-Royen yang berhasil mengembalikan pemerintahan Republik Indonesia di Yogyakarta.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian lain yang berkaitan dengan Mohamad Roem dan Perundingan Roem-Royen. Penelitian ini juga diharapkan

dapat memberikan gambaran mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan melalui jalur diplomasi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, terutama dalam pembelajaran sejarah Indonesia di sekolah tingkat menengah maupun perguruan tinggi sehingga pembaca dapat meneladani semangat perjuangan tersebut.

D. Metode dan Bahan Sumber

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode historis. Hasil dari penelitian ini akan ditulis berdasarkan dimensi ruang dan waktu. Untuk dapat menyajikan hasil rekonstruksi peristiwa sejarah yang sesuai kaidah, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah dan melewati tahap-tahap penelitian sejarah (Kuntowijoyo, 2013). Penelitian sejarah memiliki tahapan sebagai berikut:

a. Heuristik

Heuristik merupakan tahapan untuk mencari dan mengumpulkan sumber-sumber, baik sumber primer maupun sumber sekunder yang berkaitan dengan tema penelitian sejarah. Pencarian dan pengumpulan sumber dilakukan untuk mendapatkan data-data atau informasi yang dapat menunjang penulisan sejarah. Penelitian ini menggunakan sumber buku, jurnal, dan foto yang didapatkan melalui Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, Perpustakaan Jakarta, Ruang Baca Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, dan website resmi Arsip Nasional Republik Indonesia. Sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis langsung oleh Mohamad

Roem selaku ketua delegasi RI dalam Perundingan Roem-Royen dan foto-foto pribadi milik Roem.

b. Kritik Sumber

Setelah mencari dan mengumpulkan sumber, maka langkah selanjutnya adalah melakukan kritik sumber atau verifikasi. Kritik sumber dilakukan untuk memastikan bahwa buku dan jurnal yang digunakan terbukti kredibel untuk dijadikan sebagai sumber dari penulisan penelitian sejarah. Kritik sumber dibagi menjadi dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik esktern dilakukan secara tidak langsung karena sumber-sumber penelitian ini didapatkan dari buku-buku yang terdapat di Perpustakaan Nasional RI, Perpustakaan Jakarta, dan Ruang Baca Sejarah milik program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta sehingga buku-buku telah diverifikasi oleh lembaga tersebut. Stempel masing-masing lembaga yang terdapat pada buku sumber sama dengan buku lainnya. Sumber yang akan dilampirkan dalam penelitian ini juga didapatkan melalui website resmi Arsip Nasional Republik Indonesia sehingga foto-foto yang tercantum sudah diverifikasi oleh pihak Arsip Nasional Republik Indonesia.

Kritik intern yang dilakukan dalam penelitian ini adalah membandingkan isi dari Perundingan Roem-Royen dalam buku yang berjudul Bunga Rampai dari Sedjarah dengan buku Perjuangan Mempertahankan Kemerdekaan Indonesia. Hasilnya adalah dalam kedua buku tersebut sama-sama menjelaskan bahwa isi dari hasil

Perundingan Roem-Royen antara lain mengembalikan pemerintahan RI ke Yogyakarta dan pihak Belanda harus menarik pasukannya dari wilayah Yogyakarta.

c. Interpretasi

Tahap selanjutnya adalah interpretasi. Interpretasi dibagi menjadi dua, yaitu interpretasi sintesis, menggabungkan fakta-fakta sejarah yang telah didapatkan setelah melewati tahapan heuristik dan kritik sumber sehingga tercipta sebuah tulisan sejarah yang baik. Yang kedua adalah interpretasi analisis, dilakukan dengan cara membandingkan secara objektif sumber yang telah didapat dan sudah melalui tahap kritik sumber sehingga isi dari penelitian ini dapat terhindar dari subjektivitas.

d. Penulisan Sejarah

Setelah melewati tahapan-tahapan di atas, maka tahapan akhir dalam penelitian sejarah adalah penulisan. Penulisan dilakukan dengan mengacu pada sumber-sumber yang telah diverifikasi dan menjabarkan fakta-fakta sejarah yang diteliti didapatkan melalui tahapan interpretasi.

Dengan mengikuti tahapan serta metode penelitian sejarah yang sesuai kaidah, maka penulisan sejarah dapat tersaji dengan runtut dan jelas, serta dapat dipertanggungjawabkan karena menggunakan sumber-sumber yang kredibel.